

Pengembangan Destinasi Wisata “Geopark” Lumpur Lapindo

Hendra Sukmana¹

Kukuh Sinduwiatmo²

¹Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,

²Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo

email : hendra_sukmana91@yahoo.co.uk; kukuhsindu@yahoo.com

Abstrak

Lumpur Lapindo adalah salah satu potensi wisata baru di Sidoarjo yang memiliki nilai strategis untuk dikelola, dikembangkan, dan dipasarkan. Pengembangan wisata baru “Geopark” Lumpur Lapindo Sidoarjo dapat memperlihatkan kepada dunia bahwa bencana alam kemanusiaan tersebut dapat membangkitkan potensi ekonomi masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterlibatan stakeholder pada implementasi program dana bergulir di Kabupaten Sidoarjo. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini berupaya memberikan gambaran objektif dan komprehensif tentang keadaan sebenarnya tentang pengembangan destinasi wisata “Geopark” Lumpur Lapindo. Data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dari PT. Lapindo Brantas, LSM, dan Kepala Bappeda Sidoarjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan destinasi wisata “Geopark” lumpur lapindo perlu sinergi keterlibatan stakeholder mulai dari pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, PT Minarak Lapindo Brantas selaku korporasi yang bertanggung jawab atas bencana lumpur dan memiliki tanah di kawasan peta area terdampak lumpur, serta masyarakat sekitar yang ikut serta dalam pembangunan dan pengembangan destinasi wisata “geopark”.

Kata kunci : pengembangan, destinasi wisata, geopark

Tourism Destination Development of "Geopark" Lumpur Lapindo

Abstract

Lumpur Lapindo is one of the new potential tourism in Sidoarjo which has strategic value to be managed, developed and marketed. The development of new tourism "Geopark" Lumpur Lapindo Sidoarjo can show the world that the humanitarian natural disaster can generate economic potential of local communities. This study aims to describe the involvement of stakeholders in the implementation of revolving funds program in Sidoarjo. Through a qualitative descriptive approach, this research seeks to provide an objective and comprehensive picture of the true state of development of the tourist destination "Geopark" Lumpur Lapindo. Data obtained through interviews with resource persons from PT. Lapindo Brantas, NGOs, and Head of Bappeda Sidoarjo. The results of this study indicate that the development of "Geopark" Lumpur Lapindo tourism need the involvement of stakeholders from the government, in this case the Government of Sidoarjo, PT Minarak Lapindo Brantas as the corporation responsible for the disaster, the owner of the land in the area affected of mud, and the surrounding community who participated in the development of "geopark" tourist destinations.

Keywords: development, tourism destination, geopark

Pendahuluan

Pariwisata adalah salah satu industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan. Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomi, sosial dan budaya. Namun, jika pengembangannya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan atau bahkan merugikan masyarakat. Untuk menjamin supaya pariwisata dapat berkembang secara baik dan berkelanjutan serta mendatangkan manfaat bagi manusia dan meminimalisasi dampak negatif yang mungkin timbul maka pengembangan pariwisata perlu didahului dengan kajian yang mendalam, yakni dengan melakukan penelitian terhadap semua sumber daya pendukungnya.

Kebijakan pemerintah daerah setempat untuk kepariwisataan daerah yaitu dengan meningkatnya wisatawan di sektor pariwisata yang berkunjung maka secara langsung akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan masyarakat sekitar obyek wisata. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang diatur dan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan lebih luas pada Pemerintah Daerah untuk mengelola wilayahnya, membawa implikasi semakin besarnya tanggung jawab dan tuntutan untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka menopang perjalanan pembangunan di daerah. Dengan adanya UU tersebut pemerintah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan obyek wisata.

Kabupaten Sidoarjo sejak tanggal 29 Mei 2006 telah dikenal oleh banyak orang sebagai kota lumpur. Karena, di Kabupaten Sidoarjo telah terjadi bencana semburan lumpur panas Lapindo yang terjadi di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo Kecamatan Porong. Sehingga, tragedi tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan sekitarnya.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu tempat wisata yang strategis dan potensial untuk dikelola, dikembangkan dan dipasarkan. Obyek alam rekreasi berupa wisata Lumpur Lapindo adalah salah satu potensi wisata terbaru yang ada di Sidoarjo. Meski awalnya berupa bencana alam yang menimpa warga Sidoarjo, tetapi dengan berjalannya waktu masyarakat Sidoarjo dan pemerintahan Sidoarjo bangkit kembali di sektor pariwisata dan mengembangkan potensi wisata baru “Geopark” Lumpur Lapindo Sidoarjo kepada dunia.

Berita mengenai semburan lumpur panas Lapindo yang banyak dimuat oleh media massa telah menimbulkan rasa penasaran setiap orang mengenai bencana semburan lumpur panas Lapindo. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh warga sekitar dengan cara mengubah tanggul penahan lumpur panas menjadi sebuah tempat wisata. Alasan warga sekitar memanfaatkan tanggul penahan lumpur panas sebagai tempat wisata karena, melihat antusiasme orang-orang untuk melihat lumpur panas Lapindo sangat besar. Sehingga, membuat warga optimis tempat wisata tersebut bisa mendatangkan keuntungan bagi mereka. Walaupun, semburan lumpur panas Lapindo tidak cocok dijadikan tempat wisata. Hal itu, didukung oleh pendapat Isnaeni (2010) yang mengatakan bahwa semburan lumpur panas Lapindo belum layak dijadikan obyek wisata. Tetapi, pihak Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo sebagai pemegang kebijakan, BPLS, dan masyarakat sebagai penunjang

kegiatan pariwisata bekerja sama untuk mewujudkan semburan lumpur Lapindo menjadi salah satu obyek wisata di Kabupaten Sidoarjo.

Pada tahun 2012, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) selaku pengelola area lumpur Sidoarjo merencanakan masterplan area luar terdampak Lumpur Sidoarjo yang digunakan sebagai pengembangan wisata. Salah satu dari perencanaan itu adalah taman geologi (*geopark*).

Dalam pembahasan kebijakan publik terkait dengan pengembangan destinasi wisata Geopark Lumpur Lapindo, aktor mempunyai posisi yang sangat strategis bersama-sama dengan faktor kelembagaan (institusi) kebijakan itu sendiri. Interaksi aktor dan dalam kelembagaan inilah yang kemudian menentukan proses perjalanan dan strategi yang dilakukan oleh komunitas kebijakan dalam makna yang lebih luas.

Pada prinsipnya aktor kebijakan adalah mereka yang selalu dan harus terlibat dalam setiap proses analisis kebijakan publik, baik berfungsi sebagai perumus maupun kelompok penekan yang senantiasa aktif dan proaktif dalam melakukan interaksi dan interrelasi dalam konteks analisis kebijakan publik (Howlett & Ramesh, 1995).

Dalam keterlibatan *stakeholder* dalam hal pengembangan destinasi wisata Geopark Lumpur Lapindo perlu sinergitas lembaga-lembaga publik secara luas, terutama dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan. *Stakeholder* merupakan para pihak, pelaku atau pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan suatu isu atau rencana. *Stakeholder* juga diartikan sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.

Pada lingkup perencanaan, *stakeholder* memiliki peran penting untuk mencapai sebuah visi dan misi serta tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Adanya kebijakan yang telah ditetapkan, *stakeholder* akan melaksanakan program pembangunan dan mengerjakan program dari kebijakan yang ada sesuai dengan ilmu pengetahuan, pengalaman serta keahlian yang dimiliki. Dalam memberikan pelayanan tersebut, *stakeholder* harus mengutamakan publik atau masyarakat secara menyeluruh dan tidak fokus pada tiap individu.

Menurut Freeman dan McVea (2001) *stakeholder* dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu : 1. *Stakeholder* utama; merupakan *stakeholder* yang memiliki keterkaitan langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek seperti: masyarakat dan tokoh masyarakat serta manajer publik, 2. *Stakeholder* pendukung; merupakan *stakeholder* yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek; tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga turut untuk bersuara serta berpengaruh pada sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. 3. *Stakeholder* kunci; merupakan *stakeholder* yang memiliki kewenangan secara legal dalam pengambilan keputusan sesuai dengan level yang dimiliki. *Stakeholder* kunci yang dimaksudkan adalah unsur eksekutif sesuai dengan tingkatan, legislatif dan instansi.

Stakeholder merupakan para pihak, pelaku atau pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan suatu rencana ataupun kebijakan. Dapat juga diartikan sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti

mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Untuk penelitian ini memiliki struktur dan kerangka yang fleksibel. Dengan harapan mampu menggambarkan secara utuh dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti sebagaimana yang telah dijabarkan dalam fokus penelitian. (Creswell, 2014). Penelitian ini mengambil tempat di kawasan terdampak lumpur lapindo Kabupaten Sidoarjo.

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bakal menggarap kawasan lumpur Lapindo sebagai kawasan wisata unggulan Kota Delta. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah. Pemerintah menggaet beberapa stakeholder terkait untuk memberi masukan dan bergabung bersama dalam mewujudkan kawasan wisata “Geopark”. Langkah kongkrit yang ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terlihat dalam langkah awal pada tanggal 20 Juli 2017, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sidoarjo. Dalam hal ini dikukuhkan oleh Wakil Bupati Sidoarjo terlepas dari efek bencana yang ditimbulkan. Berikut kutipan wawancara dengan Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin ketika dimintai keterangan oleh peneliti terkait dengan pendapatnya sebagai stakeholder kunci dalam perencanaan pengembangan wisata “Geopark” Lumpur Lapindo dalam hal ini mewakili kalangan eksekutif.

“Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) merupakan terobosan baru pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selama ini Sidoarjo hanya dikenal dengan Kota Industri. Kedepan harapan kita semua Kabupaten Sidoarjo agar lebih dikenal dengan destinasi wisatanya khususnya pengembangan destinasi wisata “Geopark” Lumpur Lapindo. dengan Badan ini akan merancang konsep lumpur Lapindo menjadi kawasan “Geopark” dan ekowisata, Orang luar Sidoarjo memang tahunya Sidoarjo ada Lumpur dan [Lumpur Lapindo](#) merupakan fenomena unik yang langka”.

Melihat kondisi terkini lokasi terdampak lumpur lapindo punya potensi yang besar. Kawasan seluas lebih dari 600 hektar ini kini memiliki ekosistem alam sendiri yang baru dan memiliki potensi wisata besar jika digarap serius. Harapannya kedepan bukan jadi tempat yang “tak bertuan seperti saat ini” dalam wawancara dengan wakil bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin dengan peneliti mengatakan :

"Keberadaan BPPD ini untuk semakin mengenalkan lumpur Lapindo sebagai tempat wisata unik, BPPD untuk merancang konsep kawasan wisata yang tak hanya aman, tapi juga menarik. Meski saat ini kondisi semburan lumpur relatif sudah bisa dikendalikan, faktor keamanan sangat penting, mengingat lumpur ini merupakan fenomena alam yang masuk kategori bencana. Potensi menyerap wisatawan sangat besar selama dikemas menarik dan aman. BPPD memiliki tugas melengkapi kekurangan yang ada agar kawasan lumpur menjadi tempat yang apik”

Menanggapi harapan wakil bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin yang menginginkan perencanaan destinasi wisata “Geopark” Ketua BPPD Sidoarjo, Supomo ketika diwawancarai menyatakan :

“Anggota BPPD merupakan relawan pariwisata yang ingin memajukan pariwisata Kota Delta. Kita siap melaksanakan tugas tersebut”

Selain meresmikan BPPD Kabupaten Sidoarjo, ada langkah kongkret dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengembangan kawasan lumpur lapindo seperti yang diutarakan oleh Achmad Zaini kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sidoarjo ketika di wawancarai mengatakan :

“Pemkab Sidoarjo berniat mengambil alih pengelolaan kawasan pusat semburan lumpur Lapindo di Porong. Langkah ini diambil untuk memuluskan rencana menjadikan kawasan pusat semburan lumpur sebagai lokasi wisata rencana nantinya berdiri “Geopark”. Jika menjadi destinasi wisata yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pendapatan daerah yang menguntungkan pemkab”

“Pemkab sedang menyiapkan surat kepada pemerintah pusat terkait rencana pengelolaan kawasan lumpur, baik yang masuk dalam peta terdampak atau yang di luar area terdampak. Permintaan tersebut disampaikan karena masa kerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) akan selesai pada akhir 2017. Jika sudah tidak dikelola BPLS, maka pemkab yang akan mengelolanya”

Rencananya lokasi pusat lumpur akan dijadikan kawasan geopark yang bisa dinikmati masyarakat umum. Kawasan ini akan dipercantik dan ditambah sejumlah fasilitas penunjang yang dibangun dengan menggunakan APBD Sidoarjo. Di tempat ini masyarakat bisa belajar mengenai geologi. Kendati begitu, peralihan pengelolaan juga berarti berpindahnya mandat penangan luapan lumpur.

Menanggapi rencana pemerintah untuk membangun destinasi wisata “geopark” dari lahan lumpur lapindo mendapat dukungan dari masyarakat terdampak lumpur hal ini disampaikan oleh Imam Fakhruddin warga Desa Ketapang yang menyatakan.

“Masyarakat menyambut baik keinginan pemkab untuk pengembangan wisata “geopark” perlu banyak dilibatkan dan diajak urun rembug stakeholder terkait mengenai pengembangan wisata lumpur lapindo. Masyarakat siap membantu penuh untuk hal itu, supaya bencana ini tak lagi jadi bencana tapi jadi berkah dengan adanya hal tersebut. Memang sih selama ini sekitar semburan warga memanfaatkan momen untuk dijadikan wisata dadakan tapi bisa dilihat sendiri fasilitas pendukungnya minim. Kalau nantinya dijadikan destinasi wisata “geopark” saya rasa Sidoarjo akan lebih dikenal seantero Indonesia dan perekonomian masyarakat bisa

meningkat dengan sendirinya. Karena selama ini sudah mati akibat bencana lumpur lapindo”

Pakar Geologi M. Handoko Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Pengurus Daerah Jawa Timur juga mengutarakan pendapatnya ketika diwawancarai terkait dengan pengembangan destinasi wisata “Geopark” mengatakan :

“Fenomena lumpur Sidoarjo adalah unik, keberadaan lumpur Sidoarjo sebenarnya akan menjadi berkah yang nilai ekonominya tinggi apabila dikembangkan. Kondisi disekitar semburan lumpur hari ini dalam kondisi aman, terkendali. Bahkan sumber minyak dan gas yang ada disekitar semburan sebenarnya harus dieksplorasi lebih lanjut karena itu nantinya untuk kemakmuran rakyat. Kalau kita lihat wisata Geopark di Nevada Amerika Serikat rasanya kita punya potensi itu. Dan saya yakin ga akan kalah bagus semburan lumpur di Sidoarjo dengan yang ada di Nevada. Jangan lagi ada penolakan kita punya mimpi untuk mewujudkan itu. Destinasi Wisata dunia “Geopark” di Sidoarjo. Perlu keterlibatan stakeholder terkait yang sinergi antara pemerintah Pusat serta kabupaten Sidoarjo, Masyarakat dan Lapindo Brantas sebagai pemilik lahan yang ada didalam peta area terdampak. Kondisi hari ini semburan lumpur tidak seperti awal yang sampai 200.000 an kubik perhari. Kondisi hari ini hanya 10.000-20.000 an kubik perhari jauh lebih kecil dan berangsur menurun setiap harinya kita harapkan semua semburan itu akan berhenti. Sehingga ketika keterlibatan stakeholder terkait hari ini dari proses perencanaan sampai implementasi nantinya ketika semua sudah siap lumpur sudah berhenti. Dan itu titik balik Sidoarjo punya destinasi Geopark layaknya Nevada Amerika Serikat ini bukan mimpi ini nyata tergantung stakeholder terkait mau apa tidak”

Sementara itu pihak Lapindo Brantas, Inc. Ketika di wawancarai salah satu staff humas Suady mengatakan :

“Pada prinsipnya Lapindo setuju dengan adanya wacana geopark, namun Lapindo disini punya core bisnis yang lebih memusatkan pada eksplorasi migas, perihal dengan geopark Lapindo akan mendukung yang terbaik. Sementara tanah yang mungkin dijadikan obyek wisata dalam hal ini yang terdapat di area peta terdampak. Sertifikat tanah tersebut posisi saat ini sudah digadaikan di bank untuk membayar tunggakan ganti rugi kepada warga.”

Melihat dari beberapa wawancara di atas dapat kita analisis secara cermat Menggunakan Freeman dan McVea (2001) *stakeholder* dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu : 1. *Stakeholder* utama; merupakan *stakeholder* yang memiliki keterkaitan langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek seperti: masyarakat dan tokoh masyarakat serta manajer publik, 2. *Stakeholder* pendukung; merupakan *stakeholder* yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek;

tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga turut untuk bersuara serta berpengaruh pada sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. 3. *Stakeholder* kunci; merupakan *stakeholder* yang memiliki kewenangan secara legal dalam pengambilan keputusan sesuai dengan level yang dimiliki. *Stakeholder* kunci yang dimaksudkan adalah unsur eksekutif sesuai dengan tingkatan, legislatif dan instansi.

Stakeholder utama dalam penelitian ini adalah Lapindo Brantas, Inc dan masyarakat sekitar wilayah terdampak area lumpur. Lapindo Brantas, Inc. Disini merupakan salah satu perusahaan yang terdampak dan menyebabkan terjadinya semburan lumpur Sidoarjo. Tanah yang saat ini merupakan pusat semburan merupakan lahan milik Lapindo Brantas, Inc. sehingga Lapindo Brantas, Inc. nantinya akan memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan atau program pengembangan wisata geopark.

Stakeholder pendukung dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar lumpur lapindo, dan pengamat geologi. Masyarakat sekitar lumpur Lapindo dan pengamat geologi karena tidak memiliki keterkaitan langsung dengan suatu kebijakan dan program pengembangan wisata “geopark” tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga turut untuk bersuara serta berpengaruh pada sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah.

Sementara, *stakeholder* kunci dalam penelitian ini adalah Pemkab Sidoarjo sebagai pemangku kebijakan dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) sebagai kepenjangan tangan Pemkab. Sidoarjo yang memiliki kewenangan secara legal dalam pengambilan keputusan sesuai dengan level yang dimiliki karena memiliki political power yang tinggi dan sangat kuat untuk pengembangan wisata geopark.

Menurut masterplan perencanaan kawasan wisata lumpur Sidoarjo untuk lokasi tapak geopark berada di kawasan pintu keluar tol Porong tepatnya berada di desa Ketapang kecamatan Tanggulangin.



Gambar 1.1 Lokasi Tapak
(Sumber: Wikimapia, 2014)

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan destinasi wisata “Geopark” lumpur lapindo perlu sinergi keterlibatan *stakeholder* mulai dari pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai pembuat kebijakan, Lapindo Brantas, Inc. Selaku koorporasi yang bertanggung jawab atas bencana lumpur dan pemilik lahan di kawasan peta area terdampak lumpur, serta masyarakat sekitar yang ikut serta dalam pembangunan dan pengembangan destinasi wisata “geopark” lumpur lapindo. Dengan membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan hal visioner hal tersebut didukung dengan kesediaan

Lapindo Brantas, Inc untuk merelakan lahan terdampak lumpur digunakan untuk pengembangan wisata Geopark.

Daftar Pustaka

Badan Geologi. (2013). *Perencanaan tata ruang beraspek geologi sekitar kawasan lindung Porong – Sidoarjo*. Sidoarjo: Badan Geologi.

Freeman, R. E. & McVea, J. (2001). *A stakeholder approach to strategic management*.

Howlett, M. & Ramesh, M. (1995). *Study public policy: Policy cycles and policy subsystem*. Oxford : Oxford University Press.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.